

# **ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU**

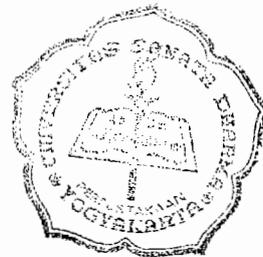
**PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Yasintha Yudita Roman Abanit Asa**

NIM : 982114138

NIRM : 980051121303120137

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2004**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Oleh :

Yasinta Yudita Roman Abanit Asa

NIM : 982114138

NIRM : 980051121303120137

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



(Fr. Reni Retno Anggreini, S.E., M.Si.,Akt)

Tanggal 01 - 03 - 2004

Pembimbing II



(Lilis Setiawati, S.E., M.Si.,Akt)

Tanggal 10 - 03 - 2004

# SKRIPSI

## ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Yasinta Yudita Roman Abanit Asa

NIM: 982114138

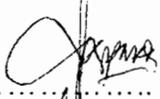
NIRM: 980051121303120137

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

pada tanggal 31 Maret 2004

dan dinyatakan memenuhi syarat

### Susunan Panitia Penguji

	<b>Nama lengkap</b>	<b>Tanda tangan</b>
Ketua	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt	
Sekretaris	Drs. G. Anto Lisianto, M.S.A.,Akt	
Anggota	Dr. Reni Retno Anggreini, S.E., M.Si.,Akt	
Anggota	Lilis Setiawati, S.E., M.Si.,Akt	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Akt	

Yogyakarta, 31 - 03 - 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dekan,  
(Dr. Hg. Suseno TW., M.S.)

## **Kupersembahkan bagi orang-orang yang Kusayangi**



Tuhan Yesus Kristus Pelindung dan Pembimbing setiap langkah hidupku dan Bunda Maria sebagai Ibu Kebijaksanaan dan Cinta Kasih.



Terima kasih kepada Orang tuaku Kakak Frater dan adik-adikku atas limpahan kasih sayang, dukungan, perhatian, doa dan keringat yang telah diberikan selama ini.



Semua Keluarga di Timor atas dukungan, doa dan dana yang telah diberikan.



Almamaterku

**Terima kasih atas segalanya**

Jangan mengharapkan menjadi apa-  
apa selain menjadi dirimu  
sendiri; dan cobalah menjadi  
dirimu yang sempurna  
(St. Francis De sales)

Keberhasilan Bukan Final, Kegagalan Juga Bukan  
Fatal. Hanya Kerendahan Hatilah Yang  
Menentukan Segalanya  
( II Tawarikh 7:14 )

Tanpa Perjuangan, Tak Mungkin Ada  
Kemajuan  
( Frederick Douglass )

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Maret 2004

Penulis



Yasıntha Yudita Roman Abanit Asa

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu**

Yasintha Yudita Roman Abanit asa

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2004

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (2) menghitung tingkat efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di bagian keuangan dan Badan Pusat Statistik kabupaten Belu selama bulan oktober tahun 2003.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui prosedur penyusunan APBD. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung efisiensi pendapatn asli daerah tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat, yang dijabarkan lagi melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. (2) Berdasarkan analisis *Least Square* pemungutan PAD di kabupaten Belu cenderung efisien dimana biaya pungut ditekan seminimal mungkin sehingga tidak melampaui rasio biaya pungut yang telah ditetapkan sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

## **ABSTRACT**

### **THE ANALYSIS OF REGIONAL REVENUE'S EFFICIENCY**

#### **The Case Study at Regional Government of Belu Regency**

Yasinta Yudita Roman Abanit Asa

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2004

This research aimed at (1) understanding the procedure of arrangement of Regional Budget (2) calculating the efficiency rate of Regional Original Revenue's collections. This research was held in the section of finances charge and Central Statistic Bureau of Belu regency on October 2003.

In order to obtain the relevant information, the methods of data collection were interview, observation, and documentation. While the technique of data analysis used were qualitative and quantitative analysis. Qualitative analysis was used to know the procedure of arrangement of Regional Budget. Quantitative analysis was used to calculate the regional original revenue's efficiency from 1998/1999 fiscal year until 2002 fiscal year.

The result of this research showed that (1) the arrangement procedure of Regional Budget followed the instruction from central government spelled out by Instruction of Regional Government Chief. (2) Based on Least Square Analysis of Regional Original Revenue, the Regional Original Revenue collection in Belu regency tend to be efficient where the cost of collection was pushed down as minimal as possible so that it didn't exceed the cost of collection ratio already established as 5% from revenue realization.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan pada Allah Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya dan karena atas karunianya maka saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tanpa ada hambatan dan halangan. Namun saya menyadari bahwa tanpa bantuan dari orang lain dan semua pihak, saya tidak akan mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

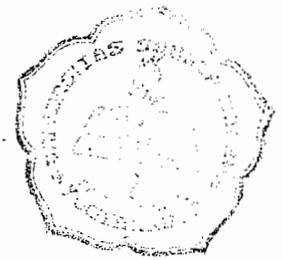
1. Bapak Drs. Hg. Suseno TW, M.S., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ibu Fr. Reni Retno Anggreini, S.E., M.Si.,Akt sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Ibu Lilis Setiawati, S.E., M.Si.,Akt sebagai pembimbing II yang telah mengarah dan membimbing penulis.
4. Bapak Drs. Ign. Kuntoro M., S.E.,Akt yang telah memberikan masukan, koreksi dan saran yang berguna.
5. Para dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membantu penulis selama ini.
6. Bapak Drs. Patrisius Asa sebagai kepala bagian keuangan Kabupaten Belu dan staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
7. Kak Rm.Renso, Kak Rm.Hiro, Kak Rm.Maxi, Sr.Ilona S.SPs, Sr.Sinta MASF dan Suster-suster S.SPs, terima kasih untuk motivasi dan doanya.

8. Semua teman-teman seperjuangan Memeng, Tiar, Ela, Gadri, Indah, Herlin, Jensri, Popy, Nona Mali, Hans ..... *I Miss U.*
9. Teman-teman alumni *SMUNZA ATAMBUA* Handri, Alex, Sari, Baba, Elly, Gress, Adolf, Ian, Feby, Budi ..... *Thanks a lot.*
10. Teman-teman kost *ANTONIA 406* Mas Nunung, Mbak Lucy, Danu dan Dimas, Marta, Koming, Cece, Miss Rina ..... Makasih yach.
11. Saudara-saudariku Kak Vero, Kak Niken, Kak Agnes, Ince, Yosefa, Beatrix, Goris, Alfredo & Sandro Billy dengan “*SASANDO*”nya, terimakasih untuk dukungan semangat, hiburan dan kebersamaan kita.
12. Adik-adikku Ledy, Windy, Bea, Vitoen, Eman, Randy, Tiek, Rita, Uris, Thory & teman-teman *IKABE YOGYA*, terima kasih untuk dukungan semangat dan kebersamaan yang kita miliki.
13. Kak Ventje, Kak Melva, Kak Hantje & Alumni *IKABE YOGYA*, Kak Obet, Kak Ester, Kak Tilly, Kak Sinta & Qundo ..... Makasih ya.

Akhirnya semoga Tugas Akhir berguna bagi semua pihak umumnya dan bermanfaat bagi mahasiswa Ekonomi khususnya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Terima Kasih.

Yogyakarta, 12 Mei 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Keuangan Daerah.....	6
1. Pengertian.....	6
2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah.....	7
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
4.1 Pengelolaan Penerimaan Daerah.....	12
4.2 Pengelolaan Pengeluaran Daerah.....	13

4.3 Prinsip-Prinsip Pengeluaran Daerah .....	15
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	16
1. Pengertian.....	16
2. Siklus Anggaran Daerah.....	18
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
1. Pajak Daerah ( <i>Local Tax</i> ).....	21
2. Retribusi Daerah ( <i>Local Retribution</i> ) .....	25
3. Bagian Laba BUMD.....	27
4. Penerimaan dari dinas-dinas ( <i>Receipts from the Services</i> ) ...	28
5. Penerimaan Lain-lain ( <i>OtherReceipts</i> ).....	29
D. Efektivitas dan Efisiensi .....	29
1. Efektivitas.....	30
2. Efisiensi .....	30
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat Penelitian.....	32
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	32
D. Data yang dicari.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Teknik Analisis Data .....	33
1. Penjelasan Prosedur Penyusunan APBD.....	34
2. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	37
A. Keadaan Geografi .....	37
B. Keadaan Penduduk .....	38
C. Pemerintahan.....	40
D. Sosial .....	41
1. Pendidikan.....	41
2. Kesehatan .....	42
3. Agama dan Sosial lainnya .....	42
E. Sumber Daya Alam.....	43

F. Penerimaan Daerah.....	43
G. Pendapatan Asli Daerah .....	44
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Prosedur Penyusunan APBD .....	47
B. Perkembangan Keuangan Daerah.....	50
1. Analisis Rasio Efisiensi.....	50
2. Perkembangan Rasio efisiensi Pemungutan PAD.....	52
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Keterbatasan Penelitian.....	59
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perhitungan Trend PAD .....	36
Tabel 4.1 Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan.....	38
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Belu.....	40
Tabel 4.3 Penerimaan Daerah Kabupaten Belu T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	44
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah T.A 1998/1999 – T.A 2002 .....	45
Tabel 5.1 Biaya dan Realisasi Pemungutan PAD Kabupaten Belu T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	51
Tabel 5.2 Efisiensi Biaya Pemungutan PAD Kabupaten Belu T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	51
Tabel 5.3 Trend Efisiensi PAD Kabupaten Belu T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	53
Tabel 5.4 Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD Kabupaten Belu T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	55

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 5.1 Trend Efisiensi PAD T.A 1998/1999 – T.A 2002 .....	54
Grafik 5.2 Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD T.A 1998/1999 – T.A 2002.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah, tetapi lebih penting agar masyarakat setempat dapat berperan serta dalam menentukan prioritas untuk menentukan pembangunan daerahnya sendiri. Agar dapat menjalankan semua tugas-tugasnya Pemerintah Daerah membutuhkan dana. Sebab pada suatu sisi lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai aktivitasnya dan pada sisi lain pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah harus mampu menentukan penggunaan anggaran secara tepat dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluarannya.

Dalam pembangunan dewasa ini, pembangunan daerah merupakan arah yang dituju. Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu.

Untuk terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan otonomi daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahnya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah guna melayani masyarakat sehingga pembangunan di daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya menurut Pamuji (JAKSP, feb 2000).

Sesuai dengan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah tingkat kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang di tetapkan peraturan pemerintah (yenni, 2000 : 15). Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang sangat besar disamping bagi hasil pajak dan non pajak, penerimaan pembangunan dan bantuan dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Dengan PAD yang semakin meningkat diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Untuk memaksimalkan PAD dituntut peran aktif instansi atau dinas atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan sumber-sumber PAD tersebut.

Karena komponen PAD mempunyai peran yang sangat penting dibidang keuangan pemerintah daerah, maka penulis tertarik untuk mengajukan skripsi dengan judul

### **“ANALISIS EFISIENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

#### **B. Batasan Masalah**

Masalah yang akan dibahas dibatasi pada penerimaan daerah pada Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002 sudah efisien?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah sudah efisien.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah kabupaten Belu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan dalam APBD, terutama dalam meningkatkan efisiensi PAD.
2. Bagi Universitas  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan bahan referensi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa.
3. Bagi Penulis  
Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II : Landasan Teori**

Bab ini berisi uraian dan teoritis studi pustaka, uraian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

### **III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **IV : Gambaran Umum Kabupaten**

Pada bab ini diuraikan mengenai keadaan geografis, keadaan penduduk, pemerintahan, sosial, dan SDA.

### **V : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data serta pembahasan.

### **VI : Kesimpulan dan Saran**

Dengan melihat hasil penelitian, pada bab ini diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian**

Dalam upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam mengatur seluruh komponen pembiayaan rumah tangga daerah secara maksimal sebab masalah keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Supriatno, (1993:174) adalah

Kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah menurut Mamesah, (1995:16) adalah

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber daya keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten yang

merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah (Yenni, 2000). Daerah sebagai badan hukum publik, yang atas dasar pemberian hak otonomi, mempunyai kebebasan memelihara dan memajukan kepentingan daerah dengan keuangan sendiri.

Asas-asas keuangan daerah menurut Mamesah (1995:35-36) yaitu

1. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan menyangkut segi pembiayaannya.

2. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

2. Tugas pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

## **2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber keuangan organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi komersial, sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Sumber keuangan

pemerintah umumnya biasanya berasal dari pajak, pengeluaran obligasi, subsidi, donasi, serta bantuan, pinjaman, dan transfer antar unit pemerintah.

Berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 tahun 1999, penyelenggaraan pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban APBD.

A. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah

B. Dana Perimbangan

1. Bagian daerah dari, Penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana alokasi umum,
3. Dana alokasi khusus

C. Pinjaman Daerah

D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

### 3. Pengelolaan keuangan daerah

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah adalah (Masri Maris, 1989 : 279) :

- a. Pertanggungjawaban (*accountability*): Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau pihak yang berkepentingan yang sah. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup : keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
- b. Mampu memenuhi Kewajiban Keuangan: Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Kejujuran: Urusan keuangan daerah harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang sangat kecil.
- d. Hasil Guna (*effectiveness*) dan Daya Guna (*efficiency*) Kegiatan Daerah: Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

- e. Pengendalian: Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

Pendapat Brian Brinder (1989) mengemukakan bahwa Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dibagi antara beberapa satuan yang terpisah

1. Sekertaris Wilayah Daerah bertanggung jawab pada kepala daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan membukukan. semua tugas dijalankan di lingkungan sekretariat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) bertugas menyusun kebijakan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan; dan menyiapkan rencana pembangunan lima tahun daerah.
3. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab langsung pada kepala daerah dan bertugas memungut berbagai pajak, retribusi daerah, biaya surat ijin dan kutipan lain. Dinas Pendapatan Daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan.
4. Bagian Pembangunan bertugas sebagai koordinator proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah dan bertanggung

jawab memantau pelaksanaan proyek-proyek tersebut dari segi fisik dan keuangan.

5. Bank Pembangunan Daerah (BPD); menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang dan menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.
6. Inspektorat Pemerintahan Daerah bertugas memeriksa keuangan daerah.

Unsur utama pengelolaan keuangan

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah menurut Brian Binder yang diterjemahkan oleh Masri, Maris dapat digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

- 1). Unsur berkala dan unsur hukum : unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berbeda dalam setahun yakni : menyusun program dan anggaran; urusan uang keluar dan uang masuk; mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantauan kegiatan berkala, yakni undang-undang dan peraturan keuangan; transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.
- 2). Unsur-unsur luar dan dalam : Unsur luar meliputi pengawasan dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi (pemerintah pusat terhadap Dati I dan II/kabupaten oleh gubernur propinsi), berdasarkan hukum, peraturan

dan pedoman; ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar.

#### **4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan peraturan perundangan di atas maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah antara lain sebagai berikut :

- a) Dalam mengalokasikan anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam meningkatkan produktifitas.
- b) Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan.
- c) Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

##### **4.1. Pengelolaan Penerimaan Daerah**

Dalam rangka membicarakan kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang dibiayai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD), maka pertama yang harus diperhatikan adalah seberapa besar pendapatan yang diterima oleh suatu daerah. Dengan diketahuinya total penerimaan yang diperkirakan dalam satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana penerimaan daerah, maka daerah berupaya menutupi kekurangan (defisit) yang terjadi. Langkah yang diambil dalam memperkecil defisit anggaran antar lain sebagai berikut:

- a. Intensifikasi
- b. Ekstensifikasi

#### **4.2. Pengelolaan Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi:

##### **a) Belanja Rutin/Operasional (*reccurent Expenditure*)**

Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi daerah.

Belanja rutin terdiri dari:

1. Belanja administrasi umum:
  - Belanja Pegawai,
  - Belanja Barang,
  - Belanja Perjalanan Dinas, dan

- Belanja Pemeliharaan.

2. Belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

**b) Belanja Investasi/Pembangunan (*Investment/CapitalExpenditure*)**

Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya. Belanja investasi terdiri dari :

1. Belanja publik. Belanja publik merupakan belanja modal (*capital expenditure*) yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

**c). Pengeluaran Tidak Tersangka**

Pengeluaran tidak tersangka adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
- Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
- Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

### 4.3.Prinsip-Prinsip Pengeluaran Daerah

Prinsip pengeluaran daerah harus dipertimbangkan meliputi: Value money, kejujuran dalam mengelola keuangan daerah, transparansi dan pengendalian.

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengeluaran daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek terpenting yang harus dipertimbangkan oleh manajer daerah adalah:

- a. Aspek legalitas pengeluaran daerah yaitu setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya.
- b. Pengelolaan (*stewardship*) atas pengeluaran daerah yang baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

#### 2. Value of Money

Pengeluaran daerah harus mendasarkan konsep *value of money*, yaitu :

- a. Ekonomi, adalah hubungan antara pasar (nilai uang) dan masukan (input). Ekonomi adalah praktek pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang memungkinkan.

- b. Efisiensi, berhubungan erat dengan konsep efektivitas, yaitu rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya.
- c. Efektifitas, merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektifitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan.

## **B. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **1. Pengertian**

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995: 20) adalah sebagai berikut :

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud

Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah, 1995:20-21)

1. Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal yang menutupi biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, sedang biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan
3. Dituangkan dalam bentuk angka, jenis jenis kegiatan dan jenis proyek
4. Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu 1 april sampai dengan 31 maret tahun berikutnya, dan tahun anggaran 2000 yaitu 1 januari sampai dengan 31 desember

Fungsi dari APBD adalah (Mamesah, 1995 : 18)

1. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan
2. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepala daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah
4. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
5. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu

## 2. Siklus Anggaran Daerah Menurut Mamesah (1995 :77)

Siklus atau garis dari anggaran daerah merupakan suatu proses, mulai dari tahap awal (perencanaan anggaran) sampai dengan tahap akhir perhitungan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Siklus anggaran daerah dibagi dalam empat tahap, yaitu :

### 1. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah

Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah, tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu, perencanaan sebagai salah satu fungsi organik manajemen maka selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya untuk daerah propinsi maupun daerah kabupaten. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan setiap tahun selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip anggaran seperti yang dikemukakan oleh Kery Soctjipto dan Seno, M.Sc, (dalam Mamesah) sebagai berikut :

- a. Prinsip keterbukaan
- b. Prinsip periodik
- c. Prinsip pembebanan anggaran pengeluaran yang menguntungkan anggaran penerimaan
- d. prinsip fleksibilitas
- e. prinsip kecermatan
- f. prinsip kelengkapan atau universal

- g. Prinsip prealabel
- h. Prinsip komprehensif
- i. Prinsip terinci
- j. Prinsip pendapatan ajek, kontinu, yaitu usaha agar pendapatan rutin dapat menutupi biaya rutin, sedang pendapatan pembangunan digunakan untuk belanja pembangunan.

## 2. Pelaksanaan Anggaran Daerah

Setelah persetujuan dan pengesahan dari DPRD maka langkah selanjutnya merupakan kewajiban masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas pemerintah sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui. Pelaksanaan anggaran harus sejalan secara rasional dan efisien, artinya pengeluaran harus dilaksanakan dengan sehemat-hematnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pada prinsipnya pelaksanaan anggaran meliputi :

- a. Pengeluaran
- b. Penerimaan
- c. Pengawasan
- d. Pertanggung jawaban
- e. Tata pembukuan
- f. Pemecahan kesulitan dalam menghadapi ketidakcocokan

## 3. Pengawasan dan Pemeriksaan Anggaran

Pengawasan dan pemeriksaan siklus anggaran terhadap APBD untuk mengetahui kebenaran formal maupun material penggunaan uang daerah, yaitu apakah cara-cara pengeluaran, prosedur dan lain-lain telah mengikuti

ketentuan yang berlaku dan apakah pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan tujuan dari pengadaan barang yang dimaksud.

Pengawasan berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemborosan, tidak tepat waktu dan sebagainya. Pengawasan terhadap keuangan daerah dapat dilakukan melalui penelitian atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dan disampaikan oleh pejabat-pejabat pengolah keuangan daerah. Pengawasan dapat pula melalui inspeksi dimana pengawas atau pemeriksa mendatangi tempat-tempat terjadinya aktivitas pelaksanaan keuangan daerah.

#### 4. Perhitungan Anggaran Daerah

Garis edar atau siklus terakhir dari anggaran daerah adalah menyusun perhitungan anggaran (*"Begrootings rekening"*), dalam hal ini membuat perhitungan pendapatan dan biaya daerah (perhitungan APBD) atau disebut perhitungan anggaran daerah. Perhitungan atau pertanggungjawaban keuangan dalam arti luas dimana seluruh kegiatan perhitungan pendapatan dan biaya daerah (perhitungan APBD) atau disebut perhitungan anggaran daerah. Perhitungan atau pertanggungjawaban keuangan dalam arti luas dimana diseluruh kegiatan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan baik menyangkut pendapatan maupun menyangkut pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (propinsi atau kabupaten) harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat di masing-masing daerah melalui wakil-wakilnya di (DPRD) serta pemerintah daerah atau pemerintah tingkat atasnya.

Kewajiban membuat perhitungan anggaran daerah ditetapkan dalam pasal 20 ayat 3 UU No 25 Tahun 1999, digariskan sebagai berikut :

“Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan”.

### **C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari, (1995:51) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi daerah adalah

Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari Dinas-Dinas, dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (Pinjaman Daerah).

Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat sebagai penyangga utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial berada didaerah terdiri dari:

#### **1. Pajak Daerah (*Local Tax*)**

##### **1.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah menurut Azhari, (1995:41) adalah Pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu Pajak Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Pajak Negara yang

pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada Daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek pajak seperti Orang/Badan dan benda bergerak atau tak bergerak.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

## 1.3. Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:

- a. Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.
- b. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah.

- c. 10% penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
- d. Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam sektor Kehutanan, sektor Pertambangan Umum dan sektor Perikanan dibagi dengan imbalan 20% Pemerintah Pusat dan 80% Pemerintah Daerah.
- e. Penerimaan Negara dari Pertambangan Minyak Bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 85% untuk Pemerintah Pusat dan 15% untuk Pemerintah Daerah.
- f. Penerimaan Negara dari pertambangan gas Alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbalan 70% untuk pemerintah Pusat dan 30% untuk Pemerintah Daerah.
- g. Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan 40% dibagikan kepada Daerah penghasil dan 60% untuk Pemerintah Pusat.
- h. Dari penerimaan Pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi Desa di wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

#### 1.4. Pajak yang dipungut Daerah tingkat II

- l. Jenis Pajak dan Tarif Pajak menurut Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Tarif Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

Pajak Hotel	10%
-------------	-----

Pajak Restoran	10%
Pajak Reklame	25%
Pajak Penerangan jalan	10%
Pajak Hiburan	35%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	20%
Pajak Parkir	20%

## 2. Tolok ukur untuk menilai pajak daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada digunakan ukuran sebagai berikut (Devas, 1989:61-62)

### a. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan dan dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan hasil pungut.

### b. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang serta pajak bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi. Pungutan tersebut harus adil dalam arti tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang



dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak harusnya dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

## 2. Retribusi Daerah (*Local Retribition*)

Retribusi Daerah menurut Soetrisno, (1993:139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Dearah menurut Munawir (1990:4) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dapat balik secara langsung dan dapat ditunjuk.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, yaitu:

1. Adanya pelayanan langsung yang sebagai iambalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari objeknya retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan yang diberikan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian retribusi tersebut tidak dapat dipungut terlalu tinggi dan tidak boleh merintang keluar masuknya barang atau pengangkutan barang ke dalam atau keluar daerah bersangkutan.

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil di dalam mengisi keuangan daerah, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu beban. Karena mempunyai arti penting bagi semua pihak maka berlakunya peraturan tentang retribusi daerah perlu pengesahan dahulu oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah

Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

- b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengeyam jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah.

### **3. Bagian Laba BUMD**

Perusahaan Daerah menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan ekonomi daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah bergerak dalam bidang-bidang dari kegiatan niaga seperti hotel dan bioskop hingga layanan umum. Perusahaan Air Minum Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terbesar selain Perusahaan Pos dan Giro, Perusahaan Listrik Daerah dan Perusahaan Telekomunikasi.

Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah atas pertimbangan menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat, untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami seperti angkutan umum atau telepon, dalam rangka mengambil alih perusahaan asing untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembagunan ekonomi daerah dianggap cara yang efisien menyediakan layanan masyarakat dan/atau menebus biaya setara untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah. (Devas, 1989:111)

Labanya perusahaan daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan harus bersifat profesional dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum.

Perusahaan daerah merupakan suatu kesatuan produksi yang bersifat (Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah)

- a. Memberi jasa
- b. Menyelenggarakan kemampuan umum
- c. Memupuk pendapatan
- d. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan diatas walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dalam perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada laba tetapi pemberian jasa untuk menyelenggarakan pemanfaatan yang bersifat umum. Perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya yaitu sifat sosial dan sifat ekonomi.

#### **4. Penerimaan dari Dinas-Dinas (*Receipts from the Services*)**

Penerimaan dari Dinas-Dinas menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintah daerah adalah penerimaan dari Dinas-Dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan lain-lain.

Dinas-Dinas daerah bertugas dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan untung dan rugi, tetapi dalam batas-

batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dan pelayanan jasa.

Sekalipun dinas-dinas daerah telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah tetapi tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor ini cukup besar karena dalam kenyataan sektor ini hanya sedikit memberikan kontribusinya bagi Pendapatan Asli Daerah.

#### **5. Penerimaan Lain-lain (*Other Receipts*)**

Penerimaan lain-lain terdiri dari hasil penjualan milik daerah misalnya penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa daerah (kas giro) dan lain-lain. Penerimaan daerah dari sektor ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari dinas-dinas.

Bagi daerah pemasukan kas daerah dari sumber penerimaan lain-lain memang tidak begitu besar tetapi diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membiayai pengeluaran pembangunan yang akan dilaksanakan.

#### **D . Efektivitas dan Efisiensi**

Efektivitas dan Efisiensi merupakan dua macam kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab tertentu. Efektivitas dan Efisiensi biasanya bersifat relatif/komparatif dan bukan bersifat absolut dalam arti bahwa efisiensi biasanya dibandingkan dengan suatu ukuran tertentu. Misal antar pusat pertanggungjawaban yang satu dibandingkan dengan pusat pertanggungjawaban yang lain, atau prestasi

sesungguhnya suatu pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan standar atau anggaran atau prestasi suatu pusat pertanggungjawaban masa kini dibandingkan dengan masa sebelumnya.

### **1. Efektivitas**

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapainya (Anthony-Dearden-Bedford, 1993:203) semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektivitas pula unit tersebut.

Unit-unit kerja dalam suatu organisasi selain efisien harus efektif karena keduanya merupakan hal yang harus dipenuhi dan tak dapat dipilih-pilih. Pusat pertanggungjawaban yang efektif adalah unit kerja yang mampu mempergunakan sedikit mungkin bahan masukan atau sumber daya untuk mencapai tingkat keluaran atau hasil tertentu. Akan tetapi seandainya tingkat keluaran dari unit kerja tidak mencukupi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai kontribusi dari unit kerja maka dikatakan bahwa unit kerja tersebut telah atau kurang efektif.

### **2. Efisien**

Menurut Anthony (1993:202) Efisien merupakan perbandingan antara keluaran dengan masukan, atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit input yang digunakan. suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika pusat pertanggungjawaban tersebut:

- a. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama
- b. Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan keluaran yang lebih besar.

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus yaitu penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di pemerintah daerah kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Waktu Penelitian Penelitian akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2003.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

1. Subyek Penelitian Subyek penelitian ini adalah bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, dan pihak lain yang terkait.
2. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti adalah
  - a. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Data Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun anggaran 2002.

#### **D. Data yang dicari :**

- a. Gambaran umum daerah
- b. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
- c. Data Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun anggaran 2002

- d. Prosedur penyusunan APBD

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi teknik pengumpulan data digunakan adalah studi lapangan yang dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data dari unit pemerintah yang menjadi objek penelitian. Penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yaitu pegawai bagian keuangan.

- b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data dari bagian keuangan Kabupaten Belu.

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Teknik analisis kuantitatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka
2. Teknik analisis kualitatif yaitu menganalisis data tanpa menghitung angka-angka, digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
3. Mendeskripsikan prosedur penyusunan APBD

Langkah yang digunakan:

1. Menjelaskan secara rinci prosedur penyusunan APBD
2. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah sudah efisien dengan menggunakan analisis rasio pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Langkah yang dipakai:

- Membuat tabel biaya dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah daerah tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun anggaran 2002.
- Membandingkan antara biaya dan realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
- Menentukan efisien tidaknya pemungutan PAD digunakan tolak ukur efisiensi dengan membandingkan angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pemungutan PAD daerah kabupaten sebesar 5% dari realisasi.

Cara pengukurannya:

- 1). Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa biaya pemungutan PAD efisien.
- 2). Apabila rasio diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

Setelah dilakukan analisis terhadap pemungutan PAD selama lima tahun yaitu apakah mengalami kenaikan atau penurunan maka digunakan analisis *Least Square* untuk menjawab permasalahan ini dengan rumus: (Budiyuwono, 1995: 211-212)

$$Y' = a + bx$$

nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$$

dengan syarat  $\Sigma x = 0$

keterangan:

Y = Trend Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta, yang akan menunjukkan besarnya nilai y apabila  $x = 0$

b = Variabel per x yaitu besarnya perubahan nilai y dari setiap perubahan suatu unit x

n = Jumlah data dari tahun 1998/1999 sampai tahun 2002

Untuk mempermudah penyelesaian rumus-rumus tersebut maka digunakan tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Perhitungan Trend**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Y	X	XY	X <sup>2</sup>
1998/1999		-2		4
1999/2000		-1		1
2000		0		0
2001		1		1
2002		2		4
Jumlah		0		10

Analisis ini digunakan untuk melihat perkembangan efisiensi pemungutan PAD selama 5 tahun anggaran yang diteliti. Setelah diketahui perkembangannya maka dapat dibuat penerapan dalam garis trend.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BELU**

#### **A. Keadaan Geografis.**

Kabupaten Belu, salah satu dari 13 kabupaten/kotamadya di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak pada koordinat 124 –126 LS. Sebelah utara berbatasan dengan selat ombai, sebelah selatan berbatasan dengan laut timor, sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Lorosae dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Luas wilayah kabupaten Belu seluas 2.445.57 km yang seluruhnya berupa daratan. Kabupaten Belu terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan Tasifeto Barat merupakan kecamatan terluas, sedangkan kabupaten Kota Atambua sebagai ibukota kabupaten mempunyai luas yang paling kecil.

Daerah kabupaten Belu beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding Asia, membuat kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 yang menggambarkan luas daerah kabupaten Belu menurut kecamatan.

Tabel 4.1

**Luas Daerah Kabupaten Belu Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>
1. Malaka Barat	273.56
2. Rinhat	151.72
3. Malaka Tengah	168.691
4. Sasitamean	172.30
5. Malaka Timur	356.72
6. Kobalima	217.06
7. Tasifeto Barat	284.43
8. Kakulukmesak	187.54
9. Tasifeto Timur	275.85
10. Raihat	87.21
11. Lamaknen	214.31
12. Kota Atambua	56.18

**Sumber : Badan Pusat Stastistik Kabupaten Belu**

**B. Keadaan Penduduk.**

Jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Pertumbuhan yang pesat akan berakibat pada sulitnya peningkatan kesejahteraan yang layak dan merata sehingga akan berakibat pada mutu kehidupan itu sendiri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dicapai.

Jumlah penduduk kabupaten Belu pada tahun 2002 berjumlah 593.610 jiwa dengan luas wilayah 2.445.57 Km. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk tahun 2002 rata-rata 242,73 jiwa/Km. Dari jumlah 593.610 jiwa ini 302.741 jiwa adalah laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 290.869 jiwa.

Pertumbuhan penduduk di kabupaten Belu dari tahun ke tahun sedikit banyak mengalami peningkatan. Pada tahun 1998 jumlah penduduk sebanyak 246.231 jiwa dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 593.610 jiwa. Ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir ini pertumbuhan penduduk terus meningkat terlebih pada tahun 2002. hal ini disebabkan oleh adanya pengungsian dari Timor Timur yang memilih tinggal di kabupaten Belu. Selain itu meningkatnya angka kelahiran karena kurang adanya pengetahuan tentang program Keluarga Berencana sehingga banyak penduduk muda dibanding penduduk tua, keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan yang tinggi. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel 4.2 yang menggambarkan Jumlah penduduk dari tahun 1998 sampai tahun 2002.

**Tabel 4.2****Kedaaan Penduduk Kabupaten Belu**

Tahun	Jumlah (jiwa)
1998	246.231
1999	252.750
2000	362.191
2001	385.973
2002	593.610

**Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu**

**C. Pemerintahan**

Kabupaten Belu yang dikepalai oleh seorang bupati, wilayahnya dibagi menjadi 12 kecamatan yaitu:

1. Malaka Barat,
2. Rinhat,
3. Malaka Tengah,
4. Sasitamean,
5. Malaka Timur,
6. Kobalima,
7. Tasifeto Barat,
8. Kakulukmesak,
9. Tasifeto Timur,
10. Raihat,

11. Lamaknen,

12. Kota Atambua.

Tiap kecamatan dikepalai oleh seorang camat. Menurut data dari Pemerintah Daerah terdapat 167 desa/kelurahan di kabupaten Belu, yang terdiri dari 75 desa swakarya (44.91%), 64 desa swadaya (38.32%), 16 desa swasembada (9.58%) dan 12 desa masih belum dapat diklasifikasikan. Sebagian besar desa di kabupaten Belu merupakan desa definitif (92.81%), sedangkan sisanya merupakan desa persiapan (7.59%).

#### **D. Sosial**

##### **1. Pendidikan**

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Secara umum perkembangan pendidikan di kabupaten Belu mengalami kemajuan tahun 2002 banyaknya sekolah, guru dan murid di kabupaten Belu sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak : terdapat 19 buah sekolah dengan murid 858 orang dan 46 orang guru
2. Sekolah Dasar (SD) : terdapat 282 buah sekolah dengan jumlah murid 56471 orang dan 2692 orang guru.
3. Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) : terdapat 33 buah sekolah dengan jumlah murid 11360 orang dan jumlah guru 350 orang.

4. Sekolah menengah Tingkat Atas (SMTA) Umum : terdapat 11 buah sekolah dengan jumlah murid 5148 orang dan jumlah guru 142 orang.
5. Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Kejuruan : terdapat 4 buah sekolah yang terdiri atas 1 Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan jumlah murid 240 orang dan jumlah guru 30 orang, 1 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) dengan jumlah murid 162 orang dan jumlah guru 18 orang, dan 2 Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) yang terdiri atas 1051 orang murid dan 63 orang guru.

## 2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mempercayai oleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya semua warga masyarakat mempercayai kehidupan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu di kabupaten Belu pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dengan dibangunnya puskesmas-puskesmas maupun rumah sakit di setiap kecamatan maupun desa-desa serta penempatan atau penyediaan tenaga-tenaga medis.

## 3. Agama dan Sosial lainnya

Mayoritas pendidikan kabupaten Belu beragama Katolik selain terdapat juga agama-agama lain yaitu Islam, Kristen Protestan, Hindu, Budha. Kerukunan antar umat beragama diupayakan untuk senantiasa tercipta. Di kabupaten Belu juga terdapat sejumlah fakir miskin, penyandang cacat, manusia lanjut usia (jompo) dan lain-lain.

### **E. Sumber Daya Alam**

Sebagian besar masyarakat kabupaten Belu bermata pencaharian petani, tanaman pangan meliputi tanaman bahan makanan terutama padi dan jagung, sayur-sayuran, buah-buahan maupun ubi-ubian dan kacang-kacangan. Tanaman pangan perkebunan merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial yaitu kelapa, kopi dan kemiri.

Pembangunan sub sektor peternakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak serta hasilnya dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, disamping meningkatkan pendapatan peternakan di gambaran umum mengenai populasi ternak di kabupaten Belu, yaitu bahwa pendidikan di kabupaten belu lebih banyak memelihara sapi ataupun kerbau, walaupun terdapat hewan-hewan peliharaan lain seperti babi, anjing, ayam dan jenis unggas yang lain. Populasi ternak ini selain dipelihara oleh penduduk, juga hidup secara liar di hutan.

### **F. Penerimaan Daerah**

Dilihat dari segi penerimaan, kondisi keuangan daerah kabupaten Belu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun masih rendahnya PAD dalam menopang penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang lebih besar berasal dari pemberian pemerintah atau instansi lebih tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 4.3 yang menggambarkan penerimaan daerah.

**Tabel 4.3**  
**Penerimaan Daerah Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999 – T.A 2002**

Jenis Penerimaan Daerah	Tahun Anggaran (000 Rp)				
	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1. Bagian sisa hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu	286.133.000	824.540.000	1.944.608.475	2.850.220.000	18.342.756.157
2. PAD	1.366.376	1.486.091	1.779.639.229	4.713.611	10.918.878.054
3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi	30.349.549	47.180.041	48.204.477.930	162.539.256	180.428.126.858
4. Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5. Bagian lain-lain penerimaan yang sah	-	-	-	-	1.366.696.475
<b>TOTAL</b>	<b>32.002.058</b>	<b>49.490.672</b>	<b>74.413.274.630</b>	<b>170.103.087</b>	<b>211.119.457.544</b>

**Sumber: Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu**

### G. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan bagi daerah sendiri dan diharapkan sebagai penyangga utama dalam membiayai segala urusan rumah tangga daerah. Pada bagian PAD ini mengalami peningkatan setiap tahun pada masing-masing pos, yaitu pos pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.4 yang menggambarkan penerimaan pendapatan asli daerah.

**Tabel 4.4**  
**PAD Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999-T.A 2002**

Jenis PAD	Tahun Anggaran (000 Rp)				
	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1. Pajak	430.135.000	546.254.000	592.933.000	750.397.458	2.979.116.900
Daerah	703.400.000	823.572.000	853.727.000	2.047.617.000	2.568.361.655
2. Retribusi Daerah	34.114.000	10.000.000	9.500.229	196.144.000	359.041.818
3. Bagian Laba BUMD	-	-	-	-	-
4. Penerimaan dari dinas-dinas					
5. Penerimaan lain-lain	198.727.000	106.266.000	323.479.000	1.719.452.542	5.075.357.681
<b>TOTAL</b>	<b>1.366.376.000</b>	<b>1.486.092.000</b>	<b>1.799.639.229</b>	<b>4.713.611.000</b>	<b>10.981.878.054</b>

**Sumber: Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu**

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama periode waktu tertentu (satu tahun) serta merupakan salah satu instrument utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan demikian hak-hak masyarakat dapat dipenuhi dan dilayani secara prima melalui kebijaksanaan ekonomi dan keuangan daerah yang peka terhadap aspirasi masyarakat.

Periode yang diteliti adalah dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun 2002 selama tahun anggaran tersebut terjadi perubahan periode tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2000. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran tersebut oleh Pemerintah Daerah kabupaten BELU dimulai pada tanggal 1 April 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000. atau selama 9 bulan sedangkan 3 bulan sebelumnya yaitu tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 31 Maret 2000 dimasukkan ke dalam tahun anggaran 1999/2000. tahun anggaran 2001 dimulai pada tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001.

### **A. Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah maka penyusunan APBD melewati penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD sebagai wakil rakyat dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah. Melalui penjangkaran aspirasi masyarakat, DPRD dapat menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan arah dan kebijakan umum anggaran daerah. Berdasarkan arah dan kebijakan yang telah disepakati maka pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas anggaran daerah. Rumusan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada DPRD untuk memastikan bahwa strategi dan prioritas anggaran tersebut sudah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah disepakati. Berdasarkan strategi dan prioritas anggaran daerah, pemerintah melalui forum warga yang terdiri dari: satuan-satuan unit kerja dan warga masyarakat menyusun rencana program dan kegiatan untuk menjadi masukan bagi tim eksekutif dan unit kerja dalam menyusun Rancangan Anggaran Daerah.

Panitia Anggaran Eksekutif berdasarkan petunjuk dari pusat, melalui Surat Keputusan Kepala Daerah kepada semua unit kerja pengelola anggaran daerah selambat-lambatnya pada bulan desember tahun berjalan untuk menyusun kebijakan dan program/proyek sesuai prioritas daerah yang telah ada. Penyusunan program/proyek berdasarkan prioritas serta dengan memperhatikan segi prioritas atau proyek-proyek daerah tersebut benar-benar mendesak untuk ditangani, besarnya manfaat bagi masyarakat dan apakah proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibiayai dengan dana swadaya masyarakat.

Berdasarkan rencana program/proyek maka setiap unit kerja diberikan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (juklak), dan Petunjuk Teknis (juknis), formulir DUKDA (Daftar usulan Kegiatan Daerah), dan DUPDA (Daftar Usulan Proyek Daerah) yang memuat kolom-kolom (yang harus diisi) mengenai tujuan dan sasaran, input yang dibutuhkan, output yang akan dihasilkan, lokasi, pelaksana, jangka waktu dan indikator kinerja, termasuk perkiraan batas/plafon anggaran yang diberikan kepada masing-masing unit kerja. Rancangan plafon anggaran ini selayaknya mempertimbangkan jumlah minimum plafon, yang setidaknya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja rutin masing-masing unit kerja.

DUKDA dan DUPDA yang telah diisi oleh masing-masing unit kerja selanjutnya diserahkan kembali ke tim panitia anggaran eksekutif. Panitia anggaran eksekutif selanjutnya akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan kesesuaian dengan program kerja yang telah diajukan sebelumnya. Berdasarkan DUKDA dan DUPDA yang masuk, panitia anggaran eksekutif selanjutnya menyusun draft Anggaran Daerah (APBD) yang nantinya diajukan dan dibahas dalam sidang pembahasan anggaran dengan pihak legislatif. Dalam sidang pembahasan anggaran ini, eksekutif memaparkan seluruh RAPBD, sedangkan pihak legislatif secara proaktif memberikan komentar, tanggapan dan masukan yang sifatnya hanya mengklarifikasikan dan meratifikasi draft anggaran yang diusulkan oleh pihak eksekutif dengan dokumen kebijakan pembangunan tahunan dan kebijakan anggaran tahunan (APBD) yang telah disepakati sebelumnya. Dokumen-dokumen itu antara lain :

1. Nota anggaran tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3. Rancangan keputusan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan dan proyek APBD

setelah diklarifikasi dan diratifikasi, selanjutnya Draft Rencana Anggaran Daerah (RAPBD) tersebut akan disahkan melalui peraturan daerah menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Walaupun anggaran daerah sudah disahkan dan ditetapkan dapat dimungkinkan perubahan anggaran. Perubahan anggaran daerah berdasarkan peraturan daerah. Yang dimaksud dengan perubahan anggaran daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membawa akibat penambahan dan/atau pengurangan anggaran yang disebabkan oleh keadaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah tidak diperlukannya lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD propinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD Kabupaten/kota, melainkan diperlukan pengesahan dari DPRD melalui Peraturan Daerah, maka peraturan daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek APBD/perubahan APBD hanya ditanda tangani oleh bupati sehingga APBD langsung dilaksanakan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan pasal 86 ayat (5) APBD beserta lampirannya agar tetap dikirim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dievaluasi.



## B. Perkembangan Keuangan Daerah ditinjau dari Rasio Efisiensi

### 1. Analisis Rasio Efisiensi

Untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan sasaran yang diperlukan prioritas perencanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan yang meliputi tepat waktu, tepat anggaran, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan PAD. Rasio efisiensi pemungutan PAD dilakukan dengan cara membandingkan biaya pemungutan PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Kriteria efisiensi yang dipakai kabupaten Belu adalah mengacu pada peraturan daerah No. 9 tahun 1998 tentang pajak pembangunan I yaitu sebesar 5%. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi tersebut adapt diartikan sebagai berikut:

- 1). Apabila rasio yang diperoleh masih di bawah standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD efisien.
- 2). Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 5% dari realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemungutan PAD kurang efisien.

Untuk menghitung besarnya rasio efisiensi terlebih dahulu diketahui besarnya biaya untuk memungut PAD dan realisasi PAD yang ditunjukkan dalam tabel 5.1

**Tabel 5.1**  
**Biaya dan Realisasi Pemungutan PAD**  
**Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999-T.A 2002**

No	Keterangan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1.	Pajak Daerah	430.135.514	546.254.335	592.932.979	750.397.458	2.979.116.900
2.	Retribusi Daerah	703.399.574	823.570.989	1.853.726.909	2.047.616.314	2.568.361.655
3.	Bagian Laba usaha daerah	34.113.868	10.000.000	9.500.000	196.143.593	359.041.818
4.	Lain-lain Pendapatan	198.726.969	106.266.206	323.479.341	1.719.452.636	5.075.357.681
5.	Biaya pemungutan PAD	59.750.200	52.520.000	78.170.000	95.425.500	104.968.050

Sumber : Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu

Setelah mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dan realisasi PAD maka efisiensi penggunaan anggaran dapat diketahui dengan cara perbandingan antara biaya dan realisasi penerimaan.

Untuk melihat efisiensi biaya pemungutan PAD dapat dilihat pada tabel 5.2

**Tabel 5.2**  
**Efisiensi Biaya Pemungutan PAD**  
**Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999-T.A 2002**

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Tingkat Efisiensi (%)
1998/1999	Rp. 59.750.200	Rp. 1.366.376.000	4,37
1999/2000	Rp. 52.520.000	Rp. 1.486.092.000	3,53
2000	Rp. 78.170.000	Rp. 1.779.639.229	4,39
2001	Rp. 95.425.500	Rp. 4.713.611.000	2,02
2002	Rp. 104.968.050	Rp. 10.981.878.054	0,95

Sumber: Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu (data diolah penulis)

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa:

- a. Pada tahun anggaran 1998/1999 rasio efisiensi sebesar 4,37% hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah efisien. Karena kurang dari standar yang ditetapkan yaitu 5%.
- b. Pada tahun anggaran 1999/2000 nilai efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,84% dari tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 3,53% yang berarti bahwa pemungutan PAD pada tahun tersebut sudah efisien
- c. Pada tahun anggaran 2000 nilai efisiensi mengalami peningkatan sebesar 0,86% dari tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 4,39%. Rasio efisiensi mengalami peningkatan namun tidak begitu berpengaruh karena masih dibawah standar. Namun pada tahun anggaran 2001 nilai efisiensi kembali mengalami penurunan sampai 2,02%.
- d. Pada tahun anggaran 2002 nilai efisiensi terus mengalami penurunan sampai dengan 0,95% yang berarti tingkat efisiensinya mengalami peningkatan. Biaya pemungutan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mengikuti besarnya peningkatan realisasi PAD tersebut.

## 2. Perkembangan Rasio Efisiensi Pemungutan PAD

Untuk mengetahui perkembangan efisiensi biaya pemungutan PAD selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis *Least Square* dengan rumus:

$$Y' = a + bx$$

Dimana :

$Y'$  = Trend Efisiensi PAD

$a$  = Konstanta yang akan menunjukkan besarnya perubahan nilai  $y$  apabila  $x=0$

$b$  = Variabilitas per  $x$  yaitu besarnya perubahan nilai  $y$  dari setiap perubahan suatu unit  $x$

Tabel 5.3 menunjukkan trend efisiensi PAD

**Tabel 5.3**  
**Trend Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999 - T.A 2002**

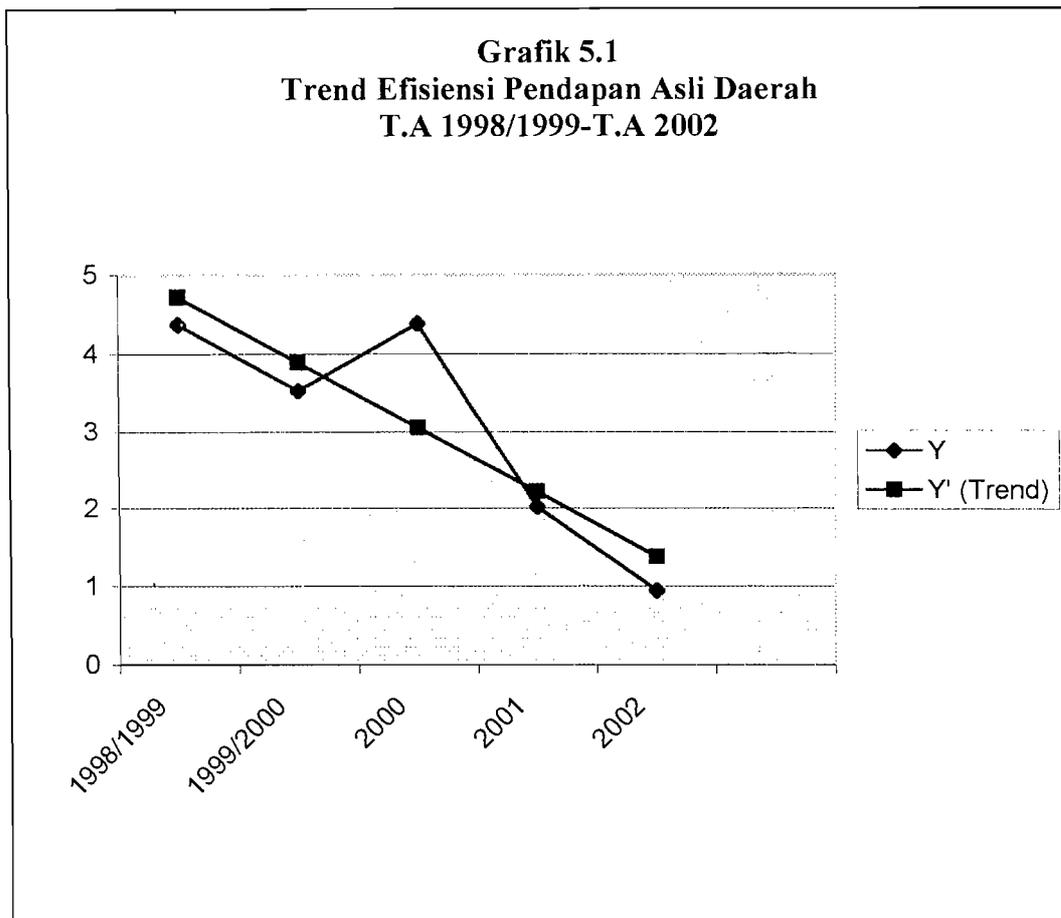
Tahun Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	X	XY	X <sup>2</sup>	Y' (%)
1998/1999	4,37	-2	-8,74	4	4,72
1999/2000	3,53	-1	-3,53	1	3,89
2000	4,39	0	0	0	3,05
2001	2,02	1	2,02	1	2,22
2002	0,95	2	1,9	4	1,38
Jumlah	15,26	0	-8,35	10	

Sumber: Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu (data diolah penulis)

Nilai  $a$  dan  $b$  dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{15,26}{5} = 3,052 \quad \text{dan} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-8,35}{10} = -0,835$$

Dari tabel 5.3 dapat diketahui bahwa biaya pemungutan PAD yang ditetapkan tiap-tiap tahun anggaran selalu mengikuti jumlah pendapatan daerah. Setelah diketahui perkembangan efisiensi biaya pemungutan PAD dalam trend untuk tahun 1998/1999-2002 kemudian dibuat penerapan garis trend yang dapat dilihat pada grafik 5.1



Langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya maka perlu kita ketahui pertumbuhan dari masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran khususnya PAD, total penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Untuk mengetahui pertumbuhan tersebut digunakan rumus:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Dimana :

$P_n$  = data pada tahun ke - n

$P_0$  = data pada tahun ke - 0

r = pertumbuhan

rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 5.4

**Tabel 5.4**  
**Rasio Pertumbuhan Realisasi APBD**  
**Kabupaten Belu**  
**T.A 1998/1999 – T.A 2002**

No	Penerimaan	1998/1999	1999/2000	2000	2001	2002
1.	Pend. Asli Daerah	1.366.375.925	1.486.091.530	1.799.639.229	4.713.610.000	10.981.878.054
2.	Pertumbuhan PAD	-	8,76%	19,7%	164,8%	132,9%
3.	Tot. Pend Daerah	32.002.057.882	49.490.672.132	74.413.274.630	170.103.087.217	211.119.457.545
4.	Pert.Tot. Pend. Dae	-	54,6%	50,4%	128,6%	24,1%
5.	Belanja Rutin	21.487.436.536	28.738.183.624	48.081.250.350	112.405.980.059	128.626.751.034
6.	Pertumb.Belj Rutin	-	33,7%	67,3%	133,7%	14,4%
7.	Belanja Pembang	9.690.081.401	18.807.880.033	23.481.803.844	39.354.351.000	58.169.704.260
8.	PertmbBelj.pembang	-	94,1%	24,8%	67,6%	47,8%

Sumber: Bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Belu (data diolah penulis)

Dari perhitungan rasio pada tabel 5.4 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD kabupaten Belu pada tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggara 2002 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Meskipun selama periode diatas pertumbuhan APBD yang terjadi setiap tahun tidak sama, namun cenderung meningkat terus dari tahun ke tahun.

Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami peningkatan

sebesar 8,76% atau sebesar Rp 119.715.605,-. Tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan 19,7% atau sebesar Rp 293.547.699,-. Tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan 164,8% atau sebesar Rp 2.933.970.771,-. Dan pada tahun anggaran 2002 mengalami peningkatan pula sebesar 132,9% atau sebesar Rp 6.268.054. dengan demikian pertumbuhan rasio PAD rata-rata setiap tahunnya sebesar 81,54% atau sebesar Rp 4.065.518.947,6,-. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi.

Pada komponen total penerimaan daerah tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami peningkatan 54,6% atau sebesar Rp 17.488.614.250,-. Tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan 50,4% atau sebesar Rp 24.921.602.498,-. Pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan 128,6% atau sebesar Rp 95.689.812.587,-. Dan pada tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2002 mengalami peningkatan pula sebesar 24,1% atau sebesar Rp 41.016.370.328,-.

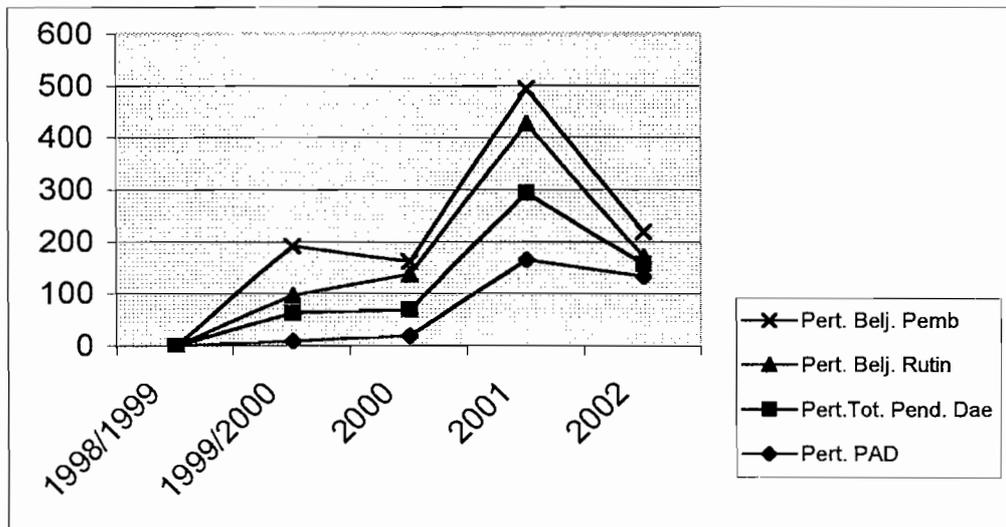
Pada komponen belanja rutin dari tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami peningkatan 33,7% atau sebesar Rp 7.250.747.088,-. Tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan 67,3% atau sebesar Rp 19.430.066.726,-. pada tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan 133,7% atau sebesar Rp 64.324.729.709,-. Dan pada tahun anggaran 2001 sampai

dengan tahun anggaran 2002 mengalami peningkatan pula sebesar 14,4% atau sebesar Rp 16.220.770.975,-. Pada komponen belanja rutin dari tahun anggaran 1998/1999-2002 mengalami kenaikan terutama pada bagian belanja pegawai yang lebih meningkat pada tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002 karena rencana belanja sudah diperhitungkan untuk pegawai eks Timor Timur akibat jajak pendapat tahun 1999 disamping itu rencana belanja pegawai untuk penerimaan calon pegawai baru dan kepindahan dari daerah lainnya.

Pada komponen belanja pembangunan dari tahun 1998/1999 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 mengalami peningkatan sebesar 94,1% atau sebesar Rp 9.117.798.632,-. Tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000 mengalami peningkatan 24,8% atau sebesar Rp 4.637.923.811,-. Tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2001 mengalami peningkatan 67,6% atau sebesar Rp 15.872.547.156,-. Tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2002 mengalami peningkatan 47,8% atau sebesar Rp 18.815.353.260,-. Alokasi anggaran pembangunan dilakukan secara proporsional terutama pada sektor-sektor yang dapat menunjang tumbuhnya perekonomian daerah.

Setelah diketahui rasio pertumbuhan realisasi APBD, kemudian dibuat penerapan garis pertumbuhan yang dapat dilihat pada grafik 5.2

**Grafik 5.2**  
**Grafik Pertumbuhan Realisasi APBD**  
**T.A 1998/1999-T.A 2002**



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan telah yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Prosedur penyusunan APBD telah mengikuti pedoman yang berlaku dari pemerintah pusat sesuai dengan UU No 22 tahun 1999. Hal ini membawa hasil yang baik bagi pemerintah daerah Belu dalam pelaksanaan kegiatan, program/proyek daerah, karena dapat mempercepat dimulainya waktu pelaksanaan kegiatan, program/proyek daerah agar dapat selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam APBD.
2. Tingkat efisiensi PAD berkisar antara 0,95% - 4,37%. Berdasarkan analisis *Least Square* tingkat efisiensi PAD di kabupaten Belu cenderung efisien yaitu sebesar 3,05% dimana besarnya biaya pungut berhasil ditekan seminimal mungkin terhadap realisasi dan masih dibawah standar rasio biaya pemungutan untuk daerah kabupaten Belu sebesar 5%.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Penulis tidak melampirkan Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah karena data untuk tahun anggaran 2000 belum direkap oleh bagian keuangan.

2. Keterbatasan waktu penelitian sehingga penulis tidak dapat meneliti lebih jauh hal-hal tertentu yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD seperti faktor-faktor yang mempengaruhi keengganan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini berhubungan dengan besarnya tunggakan pembayaran pajak daerah selama lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1998/1999 sampai tahun anggaran 2002.

### **C. Saran**

Saran yang dapat diberikan sebagai masukan kepada pemerintah daerah kabupaten Belu adalah:

1. Disarankan untuk bagian keuangan agar selalu tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan daerah sehingga dapat memperlancar rencana penyusunan APBD untuk tahun berikutnya.
2. Perlu adanya informasi yang jelas dari pemerintah daerah mengenai prosedur pembayaran bagi wajib pajak dalam rangka meningkatkan PAD. Pemberitahuan melalui surat kabar, radio, dan media komunikasi lainnya perlu digalakkan sehingga masyarakat sebagai wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony-Deadren-Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Manajemen I*. Jakarta: Binarupa Aksara
- Azhari, A. Samudra, Msi. (1995). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiyuwono, Nugroho. (1995), *Pengantar Statistik dan Ekonomi Perusahaan* Yogyakarta: UPP AMP
- Devas, Nick. (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Masri. Jakarta : Universitas Indonesia
- Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri SW, (1982). *Anggaran Perusahaan*, UGM Yogyakarta
- Halim, Abdul. (2001), *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- H. Sunarto, Y. F. Kahayan dan Zulfikar, *Alternatif-Alternatif dalam Pemancangan Daerah*, JAKSP, Vol 02 No.01, Februari 2000
- Kabupaten Belu, *Pajak Pembangunan I*, Perda No. 9. tahun 1998
- Mamesah, D.J. (1995), *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mangonting, Yenni. (2000). *Beberapa Teori Otonomi Daerah*. Media Akuntansi No, 15/Tahun VII Nov-Des
- Mardiasmo (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset
- Milton , Toha. (1985). *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*. Jakarta: Prisma Nomor 12. LP3ES
- Munawir. (1990). *Pokok-Pokok Perpajakan* . Yogyakarta: Liberti
- Republik Indonesia. *Pemerintah Daerah*. Undang-Undang No. 22 tahun 1999
- Republik Indonesia, *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Undang-Undang No. 25 tahun 1999

Republik Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000

Republik Indonesia, *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999*, penerbit Citra Umbara, Bandung, 2000

Republik Indonesia, *Sistem dan Prosedur Pajak daerah Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain*. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999

Sutrisno. PH. (1980), *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta : BPFE UGM

Syamsi, Ibnu. (1993). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara

The Liang Gie, 1997, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta

Rosjidi (1987), *Akuntansi Pemerintahan* .Surabaya : CUM LAUDE

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah pembentukan daerah Kabupaten Belu ?
2. Geografi
  - a. Dimana letak daerah Kabupaten Belu ?
  - b. Bagaimana batas wilayahnya ?
  - c. Berapa luas wilayahnya ?
3. Penduduk
  - a. Berapa jumlah penduduk tahun 2002 ?
  - b. Bagaimana komposisi penduduk ?
  - c. Bagaimana kepadatan penduduk ?
4. Kekayaan Alam
  - a. Bagaimana struktur dan jenis tanah yang ada ?
  - b. Bagaimana pemanfaatan tanah yang ada ?
  - c. Apa saja jenis flora dan faunanya ?
5. Perekonomian
  - a. Bagaimana sektor pertanian di Kabupaten Belu ?
  - b. Industri apa saja yang ada di daerah Kabupaten Belu ?
  - c. Bagaimana sarana perhubungan yang baik darat, laut maupun udara ?
  - d. Bagaimana pengembangan sektor pariwisatanya ?
6. Politik
  - a. Bagaimana kebijakan dasar politik yang berlaku ?
  - b. Bagaimana pemerintahan yang ada ?
7. Keadaan keuangan daerah
  - a. Bagaimana kondisi keuangan daerah dilihat dari sisi penerimaan khususnya PAD ?
  - b. Bagaimana perkembangan keuangan daerah dari tahun ke tahun ?
  - c. Bagaimana prosedur penyusunan APBDnya ?



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan El Tari Nomor 1 Telp. No. (0389) 21152  
**ATAMBUA** 85711

Atambua , 14 Oktober 2003

Nomor : 423/BKBPM-BL/III/10/2003  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

K e p a d a  
Yth. Dekan FE. Universitas  
Sanata Dharma Yogyakarta

di-  
Yogyakarta

Menunjuk surat Bupati Belu Nomor : KU.900/211/X/2003 tanggal 11 Oktober 2003, perihal Laporan Selesai Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Yasintha Yudita R. A. Asa  
N I M : 982114138  
Program Studi/Jurusan : Akuntansi  
P e k e r j a a n : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Sanata Dhrama  
Yogyakarta  
Kebangsaan : Indonesia

Telah melakukan kegiatan penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul .

**" ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ."**

Lokasi : Kabupaten Belu  
Pengikut :  
Lamanya : 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

BUPATI BELU  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
KABUPATEN BELU  
Sekretaris  
*Anton*  
ANTON Z. J. TETTY, SH  
Jl. Jendral Trik. 1  
Telp. 010 082 913

Tembusan

1. Gubernur NTT Cq. Kaban Linmas Prop. NTT, di Kupang;
2. Yang bersangkutan di tempat .



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Yasintha Yudita Roman Abanit Asa  
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 11 Agustus 1980  
Alamat : Jln. Gajah Mada, RT/RW 002/001 Kel. Beirafu -  
Atambua - Belu NTT  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katolik  
Kewarganegaraan : Indonesia

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Taman Kanak-kanak Katolik Kuntum Bahagia Atambua, tahun 1985 - 1987  
Sekolah Dasar Katolik I Atambua, tahun 1987 - 1992  
Sekolah Menengah Pertama Katolik Hati Tersuci Maria Halilulik, Tahun 1992  
- 1995  
Sekolah Menengah Umum Negeri I Atambua, tahun 1995 - 1998  
Perguruan Tinggi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 1998 - 2004